**OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP BERAS BERDASARKAN KONSEP KEDAULATAN PANGAN
DI INDONESIA**

M. Rendi Aridhayandi

Mahasiswa Sekolah Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung

E-mail: mrendiaridhayandi.1991@gmail.com

Masuk: Maret 2019	Penerimaan: April 2019	Publikasi: Juni 2019
-------------------	------------------------	----------------------

ABSTRAK

Sebagai pangan pokok di Indonesia, ketersediaan beras perlu diupayakan berlanjut sampai kapanpun. Karena pertanian masih menjadi sumber mata pencaharian mayoritas angkatan kerja di Indonesia. Oleh karena itu kehadiran pemerintah sangat diperlukan, pemerintahan dapat di bedakan menjadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam UUD 1945 Pasal 18A ayat (1) menyebutkan hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Otonomi daerah menjadi salah satu wujud kebebasan bagi daerah untuk terlibat dalam merancang aktivitas politik dan pemerintahan di tingkat lokal guna menguatkan kekuasaan pemerintah pusat secara nasional. Dengan demikian peran pemerintah daerah sangat penting untuk urusan ketersediaan beras dengan adanya kewenangan otonomi daerah. Pemerintah daerah dengan otonomi daerah dapat secara bebas untuk mendesain suatu wilayahnya guna mendukung pemerintah pusat menuju ketahanan pangan.

Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan persoalan pangan ditujukan untuk mencapai tiga hal sekaligus yaitu kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Presiden Jokowi bahwa: "Ketahanan pangan merupakan sesuatu yang berbeda dari kedaulatan pangan. Ketahanan pangan hanya ketersediaan bahan pangan (logistik) di gudang dan di pasar terlepas dari asal apakah dari impor atau dari yang diproduksi secara lokal. Kedaulatan pangan berarti bahwa kita memproduksi dan memasarkan bahan makanan kita sendiri, sementara surplus produksi diekspor". Disini terlihat bahwa kedaulatan pangan bermakna lebih dalam dibanding ketahanan pangan. Dengan demikian optimalisasi pemerintah daerah guna mewujudkan kedaulatan pangan dapat berupa: 1. Reforma agraria (perlindungan lahan dengan melakukan suatu regulasi penataan ruang); 2. Perlindungan hukum kepada petani (dengan membuat regulasi yang tujuannya mensejahterakan petani); 3. Ketersediaan bibit, pupuk dan alat-alat produksi pendukung lainnya; 4. Mendaftarkan merek dan indikasi geografis produk pertanian ke Direktorat Jenderal Kekayaan

Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 5. Pengaturan harga, mutu produk dan pangsa pasar suatu produk pertanian.

Kata Kunci: Beras; Kedaulatan Pangan; Ketahanan Pangan; Pemerintah Daerah.

ABSTRACT

As a staple food in Indonesia, the availability of rice are needed to continue until whenever. Because agriculture is still the source of livelihood of the majority of the workforce in Indonesia. Hence the presence of the government is necessary, governments can differentiate into central government and local governments. In UUD 1945 Pasal 18A ayat (1) mentions the relationship of authority between the central government and provincial government, counties, and cities, or between provinces and districts and cities, regulated by law with due regard to the specificity and diversity of the area. Regional autonomy is one manifestation of freedom for the regions to be involved in designing the activity of politics and government at the local level in order to strengthen the power of national government. Thus the role of local government is very important to the affairs of the availability of rice in the presence of local autonomy. The local government and regional autonomy can be free to design a territory in support of the central government towards food security.

Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan mentions the issue of food intended to achieve three things at once, namely food sovereignty, food self-sufficiency and food security. President Jokowi that: "Food security is distinct from food sovereignty. Food security is simply the availability of foodstuffs (logistics) in the warehouse and on the market irrespective of origin whether imported or locally produced. Food sovereignty means that we manufacture and market our own groceries, while surplus production is exported ". Here we can see that food sovereignty is significantly deeper than food security. thus, the optimization of local governments in order to achieve food sovereignty can be: 1. the agrarian reform (land protection by performing a spatial planning regulations); 2. the legal protection to farmers (by making regulations that aim the welfare of farmers); 3. the availability of seeds, fertilizers and tools supporting production; 4. Registering brands and geographical indications of agricultural products to the Directorate General of Intellectual Property Ministry of law and Human Rights Republic of Indonesia; 5. setting the price, product quality and market share of an agricultural product.

Keywords: Food Security; Food Sovereignty; Rice; Regional Government.

I. PENDAHULUAN

Pertanian masih menjadi sumber mata pencaharian mayoritas angkatan kerja di Indonesia. Pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, pertumbuhan kesempatan kerja dan berusaha, meningkatkan gizi dan ketahanan pangan rumah tangga, dan mengentaskan kemiskinan di pedesaan.¹

Beras adalah hasil olahan dari produk pertanian yang di sebut padi (*Oryza sativa L.*), tidak memiliki dokumen tertulis yang menyebutkan sejarah penggunaannya sebagai bahan makanan. Akan tetapi, yang pasti manusia telah memanfaatkannya sejak ribuan tahun yang lalu. Menurut **Vries**, orang Indonesia setidaknya telah lebih dari 2.000 tahun membudidayakan padi dengan teknologi tanah jenjang (*terracing*) disertai dengan pengairan. Jadi dengan teknologi sederhana (yang biasa disebut primitif) tentunya padi

telah dibudidayakan jauh sebelumnya. Satu bukti arti padi dalam kehidupan orang Indonesia khususnya penduduk Pulau Jawa, sejak zaman purba dan masih mengakar sampai kini ialah adanya mitos dalam budaya masyarakat petani padi bahwa selamatnya tanaman padi dari kegagalan atau keberhasilan tanaman adalah berkat lindungan dan berkah dari tokoh supranatural Dewi Sri (istilah Jawa) atau Dewi Pohaci (istilah Sunda), dan sebaiknya apabila terjadi kegagalan adalah akibat ulah hewan siluman berbentuk babi hutan atau serangga bernama Kalagumarang atau Kumalagarang.²

Selaras dengan itu **Koerniatmanto Soetoprawiro** dalam keterangan Foto Sampul Buku Hukum Agribisnis dan Agroindustri (...tidak bisa dilepaskan dari tradisi agraris di Jawa beserta mitos dan legenda yang melingkupinya. Padi bagi masyarakat Jawa adalah buah kemurahan Dewi

¹ Roosganda Elizabeth, 2008, *Peran Ganda Wanita Tani dalam Mencapai Ketahanan Pangan Rumah tangga di Pedesaan*, Puslitbang Tanaman Pangan, Buletin Iptek Tanaman Pangan Vol. 3, No. 1, hlm. 60.

² Muhamad Khumaidi, 2008, *Beras Sebagai Pangan Pokok Utama Bangsa Indonesia, Keunikan dan Tantangannya* dalam Buku Pemikiran Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Perspektif Ilmu-Ilmu Pertanian dalam Pembangunan Nasional, Penebar Swadaya dan IPB Press, Jakarta, hlm. 179.

Kesuburan atau Dewi Sri atau bahkan dianggap sebagai pengejawantahan dari Dewi Sri sendiri. Oleh karena itulah padi diperlakukan secara istimewa. Pemanenan dengan menggunakan alat yang berupa ani-ani hanya dapat dilakukan dengan memotong batang padi setangkai demi setangkai. Proses ini dianggap sebagai bentuk penghargaan terhadap Dewi Sri...).³

Selanjutnya, yang disebut pangan pokok ialah pangan yang muncul dalam menu sehari-hari, mengambil porsi terbesar dalam hidangan dan merupakan sumber energi terbesar. Pangan pokok utama ialah pangan pokok yang dikonsumsi oleh sebagian besar penduduk serta dalam situasi

normal tidak dapat diganti oleh jenis komoditas lain.⁴

Sebagai pangan pokok utama bangsa Indonesia yang berawal sejak zaman purba dan tersedianya beras perlu diupayakan berlanjut sampai kapanpun karena merupakan faktor penentu (determinan) terpenuhinya kecukupan pangan dan gizi, dipertahankannya kultur kehidupan bangsa yang berwawasan adil dan makmur (Gemah Ripah Lohjinawi), serta kelestarian serasnya dinamika ekosistem tropik.⁵

Pembudidayaan padi memerlukan berbagai persyaratan yang keberhasilannya dipengaruhi oleh apa yang disebut faktor produksi, yaitu tenaga kerja, lahan (habitat), modal, manajemen (cara pengelolaan) dan norma sosio-budaya. Kemudian setelah dipanen faktor penentunya adalah penanganan *pascapanen*, yaitu pengolahan, pengepakan, penyimpanan, pengangkutan, yang dilanjutkan dengan faktor konsumsi,

³ Koerniatmanto Soetoprawiro, 2016, Dalam Keterangan Foto Sampul (Gambar Reproduksi dari Buku Berjudul *Camera-Beelden van Sumatra, Java, Bali*, Karya KT. Satake yang dipublikasikan di Surabaya tahun 1935 serta dibuat dan dicetak di Kota Middlesbrough, Inggris oleh Hood & Co. Ltd,-Sartono) Hukum Agribisnis dan Agroindustri (*Buku 1: Pengaturan dan Perlindungan Hukum atas Proses Agribisnis dan Agroindustri*)-(Buku 2: *Pengaturan dan Perlindungan Hukum atas Produk-Produk Pertanian*), Unpar Press, Bandung, tanpa halaman.

⁴ Muhamad Khumaidi, 2008, *Beras Sebagai Pangan Pokok Utama Bangsa Indonesia...*, Op.Cit, hlm. 180.

⁵ *Ibid*, hlm. 183.

yaitu penambahan jumlah penduduk, peningkatan taraf hidup, dan perubahan pola konsumsi pangan.⁶

Ketersediaan beras di gudang Bulog kerap di jadikan basis ketahanan pangan di level Propinsi maupun Kabupaten. Hal ini mengidikasikan pengutamaan beras sebagai indikator ekonomi nasional. Dominasi beras atas sumber daya pangan lainnya di Indonesia dapat ditemukan dalam istilah-istilah lokal seperti “palawija” (Sansekerta, phaladwija) yang harfiahnya berarti sesuatu yang bukan beras (sekunder) atau pangan kelas dua, sesuatu yang terkonstruksikan secara budaya (*culturally constructed*). Beras telah menjadi sumber pangan dominan yang tercermin dari 50% total konsumsi nasional⁷. Hari ini, 96% penduduk Indonesia makan beras ketimbang sumber pangan lainnya.⁸

Oleh karena itu peran Pemerintah sangat penting untuk ketersediaan

beras, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. UUD 1945 telah menyebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang; ayat (2) menyebutkan Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan; ayat (3) menyebutkan Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum; dan ayat (4) menyebutkan Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.⁹

⁶ *Ibid*, hlm. 184.

⁷ Van der Eng, P, 2001, *Food for Growth: Trends in Indonesia's Food Supply 1880-1995*, *Journal of Interdisciplinary History*, XXX: 4, hlm. 190.

⁸ Pantjar Simatupang, 1999, *Toward Sustainable Food Security: The Need for A New Paradigm*, *ACIAR Indonesia Research Project*, hlm. 33.

⁹ M. Rendi Aridhayandi, 2016, *Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual (Kajian Perpu RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23*

Selanjutnya di Pasal 18A ayat (1) menyebutkan hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah; ayat (2) menyebutkan Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Pasal 18B ayat (1) menyebutkan Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang; ayat (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih

hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.¹⁰

Dalam pemerintahan di Indonesia mengenal adanya pemerintahan daerah, **Rondinelli** dan **Cheema** menjelaskan beberapa keuntungan pemberian desentralisasi ini terutama dalam aspek hubungan pusat dan daerah, antara lain mengatasi masalah kendali pusat yang berlebihan atas daerah yang dapat memunculkan ketidaksukaan rakyat daerah kepada pusat, menambah sensitivitas pusat terhadap masalah-masalah di daerah, memberi tempat bagi representasi berbagai kelompok politik, agama, etnis, serta mampu meningkatkan stabilitas politik dan kesatuan nasional. Di balik itu semua, otonomi daerah juga menjadi salah satu wujud kebebasan bagi daerah untuk terlibat dalam merancang aktivitas politik dan pemerintahan di tingkat lokal guna menguatkan kekuasaan pemerintah pusat secara nasional.¹¹

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), Makalah yang di presentasikan di Seminar Nasional dan Call for Paper Memperingati Hari Anak Nasional, di Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur, 8 Desember 2016, hlm. 4-5.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 5.

¹¹ Rahmadani Yusran & Asrinaldi A, 2005, *Negara Kuat dalam Pelaksanaan Demokrasi*

Dengan demikian peran pemerintah daerah sangat penting untuk urusan ketersediaan beras dengan adanya kewenangan otonomi daerah. Pemerintah daerah dengan otonomi daerah dapat secara bebas untuk mendesain suatu wilayahnya guna mendukung pemerintah pusat menuju ketahanan pangan. Namun perlu diingat, bahwa ketahanan pangan bukan persoalan produksi semata tetapi lebih soal *management* investasi pada sektor-sektor non pangan dan non-pertanian dilihat sebagai bagian integral dari pencapaian ketahanan pangan. Setidaknya, ini konsisten dengan argumen **Amarya Sen** bahwa produksi pangan bukan determinan tunggal ketahanan pangan, melainkan hanyalah salah satu faktor penentu.¹²

Indonesia sempat mengalami swasembada pangan. Orde Baru sempat mengganti orientasi kebijakan pangan dari swasembada beras ke swasembada pangan secara umum

pada Repelita 3 dan 4, hasilnya sempat dirasakan pada tahun 1984 di mana Indonesia mencapai level swasembada pangan.¹³ Namun saat ini Indonesia sedang di hadapi dengan tantangan. Karena dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, persoalan pangan ditujukan untuk mencapai tiga hal sekaligus yaitu kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan.

II. PEMBAHASAN

a. Swasembada Pangan ≠ Ketahanan Pangan.

Indonesia berkomitmen untuk mencapai swasembada beras di mulai dari Program Kesejahteraan Kasimo (1952-1956); Program Sentra Padi (1956-1965), hingga Repelita. Fakta menunjukkan bahwa produksi pangan Indonesia tahun 2004 mampu memberikan hasil yang menggembirakan,¹⁴ tapi disayangkan bahwa Indonesia tidak mampu mencapai ketahanan pangan yang memadai. Peristiwa kelaparan dan

Lokal di Indonesia: Tinjauan awal terhadap Pemberlakuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Jurnal Demokrasi, Vol. IV, No. 2, hlm. 88.

¹² Jonatan Lassa, 2005, *Politik Ketahanan Pangan Indonesia 1950-2005*, ZEF, Jakarta, hlm. 8.

¹³ *Ibid*, hlm. 5.

¹⁴ FAO, *Food Outlook*, April 2004.

malnutrisi di berbagai tempat di Indonesia menunjukan hal ini.¹⁵

Swasembada dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memenuhi segala kebutuhan. Swasembada pangan adalah keadaan dimana suatu Negara dapat memenuhi tingkat permintaan akan suatu bahan pangan sendiri tanpa perlu melakukan impor dari pihak luar atau daerah lain.¹⁶

Definisi ketahanan pangan dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan yaitu kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Stevens memberikan ilustrasi yang membedakan secara tegas antara swasembada pangan dengan ketahanan pangan. Sebagai contohnya Bostwan negara dengan pendapatan perkapita sedang tapi mengalami defisit pangan yang kronis karena minimnya lahan pertanian. Strategi ketahanan pangan nasionalnya adalah swasembada tetapi akhirnya lebih berorientasi pada “*self-reliance*”, yang mana secara formal mengesahkan kontribusi yang hakiki dari pangan import terhadap ketahanan pangan nasional.¹⁷

¹⁵ Jonatan Lassa, 2005, *Politik Ketahanan Pangan...*, Op.Cit, hlm. 7.

¹⁶ Gusnatika Putri dan Khairul Anwar, 2014, *Kepentingan Pemerintah Daerah Dalam Pencapaian Swasembada Beras Di Kabupaten Siak Tahun 2012*, Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau, Vol. 1, No. 2, hlm. 7.

¹⁷ Jonatan Lassa, 2005, *Politik Ketahanan Pangan...*, Op.Cit, hlm. 8.

Tabel 1.
Ketahanan Pangan versus Swasembada Pangan.¹⁸

Kategori	Ketahanan Pangan	Ketidaktahanan Pangan
Swasembada Pangan	A	B
	Contoh: USA, Kanada, Australia, Brunei	Contoh: Indonesia, Filipina dan Myanmar
Tidak Swasembada Pangan	C	D
	Contoh: Singapura, Norwegia dan Jepang	Contoh: Malawi, Eritrea, Kenya, Kongo, East Timor

Negara-negara kategori A (USA, Kanada, Australia, Brunei) memiliki kapasitas pangan yang paling kuat karena memiliki kondisi pangan ideal di mana mereka mampu berswasembada pangan tetapi sekaligus juga memiliki ketahanan pangan yang kuat. Sedangkan Negara C seperti Singapura, Norwegia dan Jepang, mereka sama sekali tidak swasembada pangan tetapi memiliki fondasi ketahanan pangan

yang jauh lebih kuat dari Negara-negara kategori B seperti Indonesia, Filipina dan Myanmar.

Terlihat secara jelas bahwa Negara-negara kategori B mampu mencapai swasembada pangan tetapi mengalami ketidaktahanan pangan. Indonesia mampu berswasembada pangan. Ini jelas terlihat ketika Indonesia mencapai swasembada beras tahun 1984, justru jumlah bantuan pangan USA pada waktu yang sama adalah rata-rata tigapuluh kali lebih besar ketimbang dekade 90an, ketika Indonesia tidak lagi memegang predikat swasembada pangan nasional. Jelaslah bahwa swasembada tingkat nasional tidak serta merta menjawab persoalan distribusi pangan dan akses atas pangan secara adil dan merata. Negara-negara kategori D adalah yang paling rentan karena disamping tidak memiliki kapasitas produksi untuk berswasembada, juga tidak mampu menciptakan ketahanan pangan. Solusi buat negara-negara seperti ini adalah intervensi bantuan pangan internasional.¹⁹

¹⁸ Dikembangkan dari Stevens, C., Greenhill, R., Kennan, J., & Devereux S, *The WTO Agreement on Agriculture and Food Security, Commonwealth Secretariat*, 2000, hlm. 3. dikutip kembali oleh Jonatan Lassa, *Idem*.

¹⁹ Jonatan Lassa, *Idem*.

Secara ringkas, kerangka pikir yang dianut pemerintah dalam merancang kebijakan ketahanan pangan ialah:²⁰

1. Harga yang "terjangkau" dan stabil cukup untuk menjamin bahwa semua konsumen akan dapat memperoleh makanan yang cukup sesuai dengan kebutuhan hidupnya;
2. Tingkat harga di tingkat konsumen merupakan refleksi dari kecukup-sediaan pangan;
3. Stabilisasi harga beras pada tingkat yang "terjangkau" cukup untuk menjamin ketahanan pangan;
4. Produksi domestik merupakan sumber pengadaan yang paling handal untuk menjamin kecukup-sediaan pangan;
5. Oleh karena itu swasembada pangan merupakan strategi yang paling efektif untuk kebijakan ketahanan pangan dalam jangka panjang.

Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka strategi yang ditempuh pemerintah ialah jangka pendek berupa stabilisasi harga (beras), dan jangka panjang berupa swasembada pangan (beras). Paradigma dan strategi kebijakan ketahanan pangan di atas menimbulkan implikasi mendasar pada penyusunan strategi dan instrumen kebijakan produksi pangan, yaitu:²¹

1. Pembangunan pertanian diprioritaskan pada pencapaian swasembada beras dan swasembada pangan secara umum;
2. Kebijakan diarahkan pada pemacuan pertumbuhan produksi beras dan pangan secara umum agar kecukup-sediaan pangan nasional dapat dijamin setiap saat; dan;
3. Harga beras di tingkat petani harus ditekan serendah mungkin agar harga di tingkat konsumen dapat ditekan pada tingkat yang "terjangkau".

Mengacu pada ketiga butir paradigma dan strategi di atas,

²⁰ Pantjar Simatupang, 2007, *Analisis Kritis Terhadap Paradigma dan Kerangka Dasar Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional*, Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 25, No. 1, Juli, hlm. 3.

²¹ *Idem.*

kebijakan produksi pangan terfokus pada pengadaan pangan nasional dan praktis mengabaikan kesejahteraan petani. Petani hanyalah salah satu instrumen esensial dalam rangka pemantapan ketahanan pangan.²²

b. Kedaulatan Pangan Sebagai Pondasi Ketahanan Pangan.

Berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) atau *self-sufficient* yang ditempuh negara-negara berkembang anggota Non-Blok agar tidak terperosok ke dalam pengaruh Blok Barat maupun Blok Tirnur. Sebagai salah satu penggagas Gerakan Non-Blok, Presiden **Soekarno** dengan tegas menetapkan "Berdikari" sebagai garis kebijakan politik maupun ekonomi semasa pemerintahan Orde Lama. Sebagai salah satu isu paling strategis dalam bidang sosial-ekonomi-politik, maka berdikari dalam pengadaan pangan atau swasembada pangan mutlak merupakan garis kebijakan ketahanan pangan yang dianut pemerintah Indonesia semasa Orde Lama. Dengan garis kebijakan ini, impor maupun

bantuan pangan asing merupakan sumber ancaman ketahanan pangan, ekonomi maupun politik, sehingga mutlak harus dihindari.²³

Konsep "Berdikari" (berdiri di atas kaki sendiri) atau *self-sufficient* ini memiliki kesamaan dalam semangat kedaulatan pangan. Dalam sejarahnya Ketahanan pangan merupakan konsep yang diterima luas di banyak negara dan telah berjalan cukup lama. Konsep "ketahanan pangan" (*food security*) mulai digodok semenjak akhir tahun 1970-an, sedangkan "kedaulatan pangan" mulai diwacanakan semenjak tahun 1992 atau lebih dari 30 tahun setelahnya.²⁴

Definisi kedaulatan pangan dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan yaitu hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi

²² *Idem.*

²³ *Ibid*, hlm. 6.

²⁴ Syahyuti, Sunarsih, Sri Wahyuni, Wahyuning K.S., dan Miftahul Azis, 2015, *Kedaulatan Pangan Sebagai Basis Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional*, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 33, No. 2, hlm. 3.

masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Jika ditelusuri baris per baris dari seluruh pasal dalam UU Pangan, kata “kedaulatan pangan” muncul sebanyak delapan kali dalam batang tubuh, dan tiga kali dalam Bagian Penjelasan. Pada batang tubuh muncul pada pasal 2, 3, 6, 23 (1), 117, 125, 126, dan 130 (1). Dari keseluruhan kalimat dalam UU ini, kata “kedaulatan pangan” selalu muncul bersama-sama dengan “ketahanan pangan” dan “kemandirian pangan”. Ketiganya selalu muncul bersamaan, atau tidak pernah sendirian. Kata “kedaulatan pangan” berada di depan, lalu diikuti dua yang lainnya. Hal ini bisa dimaknai bahwa kedaulatan pangan merupakan hal yang harus dicapai terlebih dahulu, sebagai jalan untuk mencapai tujuan akhirnya yakni “ketahanan pangan”.²⁵

Ide dasar kedaulatan pangan adalah mengangkat kesejahteraan petani kecil yang selama ini masih terpinggirkan. Pendekatan kedaulatan pangan lebih menghargai budaya lokal,

sehingga petani dapat menanam varietas sendiri yang disukainya, dengan cara sendiri, dan memasak dengan selera sendiri karena menjunjung tinggi prinsip diversifikasi pangan sesuai dengan budaya lokal yang ada. Kedaulatan pangan mendukung sepenuhnya pola-pola pertanian yang berbasis keluarga, dimana mereka menanam sendiri dan memakan sendiri dari lahannya (*land to mouth*).²⁶

Setidaknya ada dua kesamaan antara ketahanan pangan dan kedaulatan pangan, yaitu:²⁷

1. keduanya berbicara soal yang sama yakni pangan. Namun, keduanya saling melengkapi, karena batu pijak kedua konsep ini tidaklah sama. Ketahanan pangan lebih menitikberatkan pada ketersediaan pangan bagi rakyat sebagai tujuan akhir dari pembangunan pangan, sedangkan kedaulatan pangan lebih menitikberatkan kemandirian pangan, perlindungan kepada petani dan

²⁵ *Ibid*, hlm. 7.

²⁶ *Ibid*, hlm. 12.

²⁷ *Ibid*, hlm. 13.

ekosistem lokal. Kebijakan ketahanan pangan fokus kepada sisi pangannya, sedangkan kebijakan kedaulatan pangan memperhatikan metoda dan strategi untuk mencapainya dengan memperhatikan baik pangan maupun manusianya.

2. kedua konsep sama-sama memiliki dimensi global. Saat ini konsep ketahanan pangan sedang dipakai baik di negara maju maupun berkembang, sementara konsep kedaulatan pangan berupaya memberikan koreksi kepadanya. Kedaulatan pangan berupaya menjadikan konsep ini sebagai strategi utama untuk menuju pengakuan hak-hak petani baik di level pemerintahan maupun lembaga internasional.

Inti kedaulatan pangan ada pada petani, dengan memberi perhatian dan memperkuat hak masyarakat secara bebas memutuskan pertanian dan kebijakan pangan untuk memerangi kelaparan dan kemiskinan. Selain petani berhak memilih jenis tanamannya sendiri, juga hak kepada

pangan yang sehat dan bergizi sesuai dengan preferensi budaya mereka, secara kualitas dan kuantitas yang cukup untuk mempertahankan hidup sehat dengan martabat. Lebih jauh, sesungguhnya kedaulatan pangan juga berkenaan dengan perdagangan, sumber daya alam, menghargai pengetahuan lokal, juga memperhatikan gender dan kelas, serta dalam berorganisasi.²⁸

Apa yang berkembang di Indonesia ini juga dicatat oleh **Jonatan Lassa** dan **Shrestha**, yang mengutip ucapan Presiden **Jokowi** bahwa: "Ketahanan pangan merupakan sesuatu yang berbeda dari kedaulatan pangan. Ketahanan pangan hanya ketersediaan bahan pangan (logistik) di gudang dan di pasar terlepas dari asal apakah dari impor atau dari yang diproduksi secara lokal. Kedaulatan pangan berarti bahwa kita memproduksi dan memasarkan bahan makanan kita sendiri, sementara surplus produksi diekspor". Disini terlihat bahwa kedaulatan pangan

²⁸ *Ibid*, hlm. 17.

bermakna lebih dalam dibanding ketahanan pangan.²⁹

c. **Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan Terhadap Beras.**

Pemerintah daerah dengan kewenangan otonomi daerah setidaknya memiliki 3 (tiga) pedoman untuk mengoptimalkan perannya untuk mewujudkan kedaulatan pangan khususnya terhadap beras, yaitu:

- a. Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, yaitu bahwa ada dua pihak terkait kedaulatan pangan yakni: (1) negara yang memiliki hak secara mandiri untuk menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat; serta (2) masyarakat yang juga berhak menentukan sistem pangan yang

sesuai dengan sumber daya lokal.³⁰

- b. Dokumen “Nawacita” yang dilontarkan Presiden Joko Widodo dalam visi, misi dan program aksi yang berjudul “Jalan Perubahan Untuk Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian” pada periode Mei 2014 saat kampanye pemilihan presiden. “Nawacita” bermakna sebagai sembilan agenda perubahan. Kedaulatan pangan tercantum secara jelas pada agenda nomor 7 (“Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakkan sektor-sektor Strategis Ekonomi Domestik”). Dalam cita nomor 7 ini ada lima program yaitu: (1) Membangun kedaulatan pangan, (2) Membangun kedaulatan energi, (3) Membangun kedaulatan keuangan, (4) Mendirikan bank petani/nelayan dan UMKM termasuk gudang dengan fasilitas pengolahan paska panen di setiap sentra

²⁹ Jonatan Lassa dan Maxim Shrestha, 2014, *Food Sovereignty Discourse in Southeast Asia: Helpful or Disruptive?*, Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapore, www.rsis.edu.sg, dikutip dari Syahyuti, Sunarsih, Sri Wahyuni, Wahyuning K.S., dan Miftahul Azis, 2015, Kedaulatan Pangan Sebagai Basis..., *Ibid*, hlm. 9.

³⁰ *Ibid*, hlm. 7.

- produksi tani/nelayan, dan (5) akan diarahkan untuk Mewujudkan penguatan meningkatkan surplus.³² teknologi melalui kebijakan Sektor pertanian harus mampu penciptaan sistem inovasi dibangun menjadi sektor andalan dan nasional. Membangun kedaulatan menjadi mesin penggerak pangan disebutkan akan perekonomian nasional. Dengan digunakan lima pendekatan demikian, visi pembangunan pertanian diantaranya stop impor pangan diarahkan pada upaya menciptakan khusus untuk beras.³¹ pertanian modern, tangguh dan efisien.
- c. Rencana Kerja Pembangunan Pertanian seperti itu dapat diwujudkan Jangka Menengah 2015-2019. melalui:³³ Dalam dokumen ini khususnya a. Optimalisasi pemanfaatan bab Perkuatan Kedaulatan sumber daya domestik (lahan, air, Pangan, kedaulatan pangan plasma nuftah, tenaga kerja, memuat strategi komponen modal, dan teknologi); Nawacita dengan optimal. Pada b. Perluasan spektrum bagian Kebijakan Nasional pembangunan pertanian melalui Kedaulatan Pangan, disebutkan diversifikasi teknologi, sumber bahwa sasaran pembangunan daya, produksi, dan konsumsi; berupa peningkatan produksi komoditas utama. Dalam lima tahun ke depan, produksi padi

³¹ Anonymous, *Jalan Perubahan Untuk Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkpribadian: Visi, Misi dan Program Aksi Jokowi dan Jusuf Kalla*, Mei 2014, http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_JokowiJK.pdf, 3 Maret 2015, dikutip kembali pada 16 Januari 2016.

³² Bapenas, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019*, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, 2014.

³³ Soleh Solahuddin, 2008, *Pembangunan Pertanian Tangguh dan Berkelanjutan*, dalam Buku Pemikiran Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Perspektif Ilmu-Ilmu Pertanian dalam Pembangunan Nasional, Penebar Swadaya dan IPB Press, Jakarta, hlm. 65.

c. Penerapan rekayasa teknologi pertanian spesifik lokasi secara dinamis;	diperlukan baik teknologi produksi, konservasi, dan teknologi pascapanen;
d. Peningkatan efisiensi sistem agribisnis untuk meningkatkan produksi pertanian dengan kandungan IPTEK dan berdaya saing tinggi sehingga memberikan peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat konsumen secara berimbang.	d. Sumber daya lahan yang dipergunakan harus lestari sehingga dapat menjamin kelanjutan usaha;
	e. Ada kepastian hukum atas lahan yang dipergunakan untuk investasi sehingga menggairahkan untuk usaha.

Soleh Solahuddin menyampaikan beberapa ciri yang menandai wujud dari pembangunan pertanian yang tangguh dan berkelanjutan adalah sebagai berikut:³⁴

- a. Produk pertanian berkualitas, beragam, dan harganya dapat bersaing serta dapat diproduksi dalam jumlah tertentu secara terus menerus;
- b. Pendapatan petani/investor cukup tinggi sehingga dapat memberikan kehidupan yang layak dan mampu mengembangkan usahanya;
- c. Mampu menguasai dan mengembangkan teknologi yang

Dalam konteks yang lebih mikro, pembangunan pertanian yang tangguh yang berkelanjutan ditandai dengan munculnya usaha pertanian yang berorientasi agribisnis. Diperlukan prasyarat agar terbangun usaha agribisnis yang berkembang dan berkelanjutan. Prasyarat itu antara lain:³⁵

- a. Jaminan pasar;
- b. Jaminan mutu;
- c. Ketetapan dalam pemilihan komoditas unggulan;
- d. Skala ekonomi dan kelayakan usaha;
- e. Orientasi untuk menciptakan usaha yang berkelanjutan,

³⁴ *Ibid*, hlm. 64.

³⁵ *Idem*.

- menguntungkan, mengacu pada permintaan pasar, dan berdampak ganda yang luas;
- f. Kelembagaan agribisnis yang kokoh dalam pengembangan teknologi, permodalan, pemasaran, penyuluhan, pelayanan, dan peningkatan mutu.
- g. Kemitraan yang saling menguntungkan;
- h. Faktor pendukung untuk kemudahan dalam pelayanan teknologi, perizinan investasi, permodalan, sarana produksi, distribusi, insentif, dan peningkatan mutu produk;
- i. Koordinasi dan sinkronisasi yang harmonis antar instansi terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan agribisnis.
- Dengan demikian, agenda reformasi pembangunan pertanian yang menyertai langkah-langkah di atas dalam rangka membangun pertanian tangguh dan berkelanjutan adalah sebagai berikut:³⁶
- a. Menciptakan sektor pertanian menjadi sektor andalan dan mesin penggerak ekonomi nasional melalui peningkatan produktivitas, efisiensi, dan kualitas. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, dilaksanakan koordinasi untuk memperoleh dukungan kebijakan ekonomi makro yang kondusif baik berupa kebijakan fiskal, moneter, maupun perdagangan;
- b. Membangun pertanian dengan keberpihakan kepada petani, peternak, dan nelayan untuk memberdayakan dan meningkatkan kemandiriannya sebagai subjek pembangunan, agar mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya;
- c. Mempertajam implementasi misi pembangunan pertanian dalam upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Selama ini sektor pertanian sarat dibebani oleh berbagai misi pencapaian sasaran pembangunan;

³⁶ *Ibid*, hlm. 65.

- d. Meningkatkan keberadaan petani dan kelembagaan kelompok tani agar mampu secara efektif mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan petani. Adanya organisasi petani yang kuat merupakan faktor kunci agar kepentingan petani dapat lebih diakomodasikan dalam kebijakan pembangunan. Organisasi merupakan wahana untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menganalisis masalah dan menentukan secara rasional kegiatan pembangunan pertanian yang tepat dalam pembangunan pertanian;
- e. Membangun pertanian dan aparat pertanian untuk dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, khususnya petani dan nelayan sehingga dapat menumbuhkan iklim kondusif bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan pertanian;
- f. Mendukung proses demokratisasi dalam pembangunan pertanian melalui langkah revitalisasi kelembagaan dan aparat pertanian di daerah, percepatan pelaksanaan otonomi di bidang pertanian dengan menerapkan perencanaan wilayah sebagai dasar penentuan kegiatan pembangunan pertanian;
- g. Meningkatkan keterkaitan subsistem produksi pertanian dengan subsistem lainnya (prasarana, pengolahan, pemasaran/distribusi) dalam kerangka pengembangan agribisnis;
- h. Mempertajam orientasi dan arah pengembangan komoditas pertanian dengan mengacu pada dinamika pasar, produk unggulan berdaya saing tinggi, berwawasan lingkungan, dan terintegrasi dengan sektor dan subsistem ekonomi lainnya.
- Berkaitan dengan urusan kualitas produksi, kegiatan petani pasca panen itu antara lain adalah melakukan diversifikasi vertikal. Petani di sini melakukan kegiatan pendayagunaan hasil untuk meningkatkan mutu dan nilai tambah produk atau komoditas

pertanian itu sendiri. Untuk kemudian petani melakukan kegiatan pemasaran atas hasil produksi pertaniannya itu sebagai komoditas agribisnis.³⁷

Sistem pertanian berkelanjutan adalah sistem pertanian yang mengintegrasikan agroteknologi baru ke dalam sistem pertanian yang telah ada dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan pedesaan dan sekaligus menekan erosi sehingga sistem pertanian tersebut dapat berlanjut secara terus menerus tanpa batas waktu (*sustainable*). Jadi tujuan utama pertanian berkelanjutan bukan menerapkan agroteknologi baru saja, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mempertahankan pertanian yang lestari. Oleh sebab itu, dalam sistem pertanian berkelanjutan akan diwujudkan ciri-ciri sebagai berikut:³⁸

- a. Produksi pertanian cukup tinggi sehingga petani tetap bergairah melanjutkan usahanya;
- b. Pendapatan petani yang cukup tinggi sehingga petani dapat mendisain masa depan keluarganya dari pendapatan usaha taninya;
- c. Teknologi yang diterapkan, baik teknologi produksi maupun teknologi konservasi, adalah teknologi yang dapat diterapkan sesuai dengan kemampuan petani dan diterima oleh petani dengan senang hati sehingga sistem pertanian tersebut dapat dan akan diteruskan oleh petani dengan kemampuannya secara terus menerus tanpa bantuan dari luar;
- d. Komoditas pertanian yang diusahakan sangat beragam dan sesuai dengan kondisi biofisik daerah (*site specific*), dapat diterima oleh petani dan laris di pasar;
- e. Laju erosi kecil (minimal), lebih kecil dari erosi yang dapat ditoleransi (Etol). Akibatnya,

³⁷ Koerniatmanto Soetoprawiro, 2016, *Hukum Agribisnis dan Agroindustri (Buku 1: Pengaturan dan Perlindungan Hukum atas Proses Agribisnis dan Agroindustri*, Unpar Press, Bandung, hlm. 163.

³⁸ Naik Sinukaban, 2008, *Membangun Pertanian Menjadi Industri Yang Lestari*, dalam Buku Pemikiran Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Perspektif Ilmu-Ilmu Pertanian dalam Pembangunan Nasional, Penebar Swadaya dan IPB Press, Jakarta, 2008, hlm. 69.

- produktivitas yang cukup tinggi tetap dipertahankan/ditingkatkan secara lestari dan fungsi hidrologis daerah terpelihara dengan baik sehingga tidak terjadi banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau;
- f. Sistem penguasaan/pemilikan lahan dapat menjamin keamanan investasi jangka panjang (*longterm investment security*) dan menggairahkan petani untuk terus berusaha tani;
- g. Meningkatkan lapangan kerja di daerah pedesaan.

Dengan demikian perlunya optimalisasi peran pemerintah daerah dengan kewenangan otonomi daerah, mengingat Indonesia masih memiliki banyak agenda tentang kedaulatan pangan, terutama masalah reforma agraria. Hanya kedaulatan pangan yang berbasis pada reforma agraria (*genuine agrarian reform*) sebagai bekal menghadapi multi krisis ke depan. Menurut Rosset “Kedaulatan pangan adalah satu-satunya cara untuk secara efektif melindungi ekonomi pangan nasional dari tekanan eksternal

berupa dumping, penimbunan, dan spekulasi”. Menurut Edelman, kedaulatan pangan merupakan terobosan dalam kebijakan pangan secara keseluruhan, karena akan lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Kedaulatan pangan melambangkan segala macam gerakan pembebasan dari penindasan, karena kedaulatan pangan berdasarkan kepada saling ketergantungan dan penghargaan terhadap lingkungan hidup.³⁹

Upaya perlindungan pemerintah terhadap petani dari gejolak harga beras internasional tersebut tampaknya masih harus dilakukan mengingat selama dua dekade terakhir masih menunjukkan gejala terjadinya fluktuasi harga internasional dan laju peningkatan harga domestik masih lebih tinggi dari harga pasar internasional. Harga domestik yang cenderung masih lebih tinggi dari harga internasional memang pada satu sisi menguntungkan petani dalam negeri namun pada sisi lain akan terjadi tekanan pasar internasional termasuk

³⁹ Syahyuti, Sunarsih, Sri Wahyuni, Wahyuning K.S., dan Miftahul Azis, 2015, *Kedaulatan Pangan Sebagai Basis...*, Op.Cit, hlm. 7.

berakibat terjadinya impor ilegal yang terjadi beberapa tahun terakhir. Selain itu, peningkatan konsumsi beras baik yang disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk maupun tingkat konsumsi per kapita akan menyebabkan naiknya permintaan (*demand*) beras domestik. Meningkatnya permintaan beras domestik dengan laju pertumbuhan yang lebih besar dari produksi domestik akan semakin mendorong naiknya harga beras domestik yang langsung maupun tidak langsung akan memotivasi meningkatnya impor pula.⁴⁰

Tidak kalah penting, pemerintah daerah dalam upaya kedaulatan pangan terhadap beras melakukan suatu langkah mengangkat budaya lokal, contohnya beras Pandanwangi Cianjur yang memiliki kekhasan, yaitu rasanya yang enak, pulen dan beraroma khas pandan. Untuk menghasilkan Beras Pandanwangi Cianjur yang bercita rasa khas, padi

varietas Pandanwangi hanya dapat ditanam di tujuh kecamatan di Kabupaten Cianjur, yaitu Warungkondang, Gekbrong, Cugenang, Cilaku, Cianjur, Cibeber, dan Campaka. Apabila varietas padi Pandanwangi ditanam diluar ketujuh kecamatan tersebut atau di daerah lain, maka kekhasan berasnya akan hilang terutama tekstur pulen dan aroma pandannya.⁴¹ Optimalisasi pemerintah daerah dapat berupa:

- a. Reforma agraria (perlindungan lahan dengan melakukan suatu regulasi penataan ruang),
- b. Perlindungan hukum kepada petani (dengan membuat regulasi yang tujuannya mensejahterakan petani),
- c. Ketersediaan bibit, pupuk dan alat-alat produksi pendukung lainnya;
- d. Mendaftarkan merek dan indikasi geografis produk pertanian ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum

⁴⁰ Dwidjono H. Darwanto, 2005, *Ketahanan Pangan Berbasis Produksi dan Kesejahteraan Petani*, Ilmu Pertanian, Vol. 12, No. 2, agrisci.ugm.ac.id, hlm. 159.

⁴¹ Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi Cianjur (MP3C), 2015, *Buku Persyaratan Indikasi Geografis Beras Pandanwangi Cianjur*, Kata Pengantar, 2015, hlm. i.

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

- e. Pengaturan harga, mutu produk dan pangsa pasar suatu produk pertanian.

III. PENUTUP

1. Kesimpulan

Peran pemerintah daerah dalam optimalisasi perlindungan hukum terhadap beras berdasarkan konsep kedaulatan pangan di Indonesia menjadi sangat penting ketika sumber daya alam yang melimpah, namun secara pengelolaan tidak di kelola dengan baik. Beras yang merupakan pangan pokok di Indonesia harus terus menjadi skala prioritas. Hal ini sesuai dengan definisi kedaulatan pangan dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan yaitu hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yaitu dengan otonomi daerah, maka kebijakan dapat dioptimalkan. Khususnya di bidang hukum, pemerintah daerah dapat membuat regulasi berupa peraturan daerah (perda) yang bertujuan untuk kedaulatan pangan terhadap beras.

2. Saran

Sebaiknya pemerintah daerah fokus untuk mewujudkan kedaulatan pangan terhadap beras di Indonesia, karena pemerintah pusat akan butuh peran besar pemerintah daerah sebagai pelaksana yang tahu persis kondisi di daerah. Dengan terus bertambahnya jumlah penduduk, maka akan semakin bertambahnya kebutuhan akan pangan, khususnya terhadap beras yang merupakan pangan pokok masyarakat Indonesia. Pemerintah daerah harus sadar dan paham betul faktor utama pertanian adalah lahan, oleh karena itu pengadaan lahan pertanian khususnya terhadap padi jangan sampai teralih fungsi dengan kebutuhan lainnya seperti perumahan, industri, pusat perbelanjaan dll

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bapenas, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019*, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, 2014.

Koerniatmanto Soetoprawiro, 2016, *Hukum Agribisnis dan Agroindustri (Buku 1: Pengaturan dan Perlindungan Hukum atas Proses Agribisnis dan Agroindustri*, Unpar Press, Bandung.

Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi Cianjur (MP3C), 2015, *Buku Persyaratan Indikasi Geografis Beras Pandanwangi Cianjur*, Kata Pengantar.

Muhamad Khumaidi, 2008, *Beras Sebagai Pangan Pokok Utama Bangsa Indonesia, Keunikan dan Tantangannya* dalam Buku Pemikiran Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Perspektif Ilmu-Ilmu Pertanian dalam Pembangunan Nasional, Penebar Swadaya dan IPB Press, Jakarta.

Naik Sinukaban, 2008, *Membangun Pertanian Menjadi Industri Yang Lestari*, dalam Buku Pemikiran Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Perspektif Ilmu-Ilmu Pertanian dalam Pembangunan Nasional, Penebar Swadaya dan IPB Press, Jakarta.

Soleh Solahuddin, 2008, *Pembangunan Pertanian Tangguh dan Berkelanjutan*, dalam Buku Pemikiran Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Perspektif Ilmu-Ilmu Pertanian dalam Pembangunan Nasional, Penebar Swadaya dan IPB Press, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan

C. Jurnal, Skripsi, Tesis, Internet

Anonimous, *Jalan Perubahan Untuk Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkpribadian: Visi, Misi dan Program Aksi Jokowi dan Jusuf Kalla*, Mei 2014, http://kpu.go.id/koleksigambar/VI/ISI_MISI_JokowiJK.pdf, 3 Maret 2015, dikutip kembali pada 16 Januari 2016.

Dwidjono H. Darwanto, 2005, *Ketahanan Pangan Berbasis Produksi dan Kesejahteraan Petani*, Ilmu Pertanian, Vol. 12, No. 2, agrisci.ugm.ac.id.
FAO, *Food Outlook*, April 2004.

Gusnatika Putri dan Khairul Anwar, 2014, *Kepentingan Pemerintah Daerah Dalam Pencapaian Swasembada Beras Di Kabupaten Siak Tahun 2012*, Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas

- Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau, Vol. 1, No. 2.
- Jonatan Lassa dan Maxim Shrestha,
*Food Sovereignty Discourse in
Southeast Asia: Helpful or
Disruptive?*, 2014, *Rajaratnam
School of International Studies,
Nanyang Technological
University, Singapore,*
www.rsis.edu.sg.
- Jonatan Lassa, 2005, *Politik Ketahanan
Pangan Indonesia 1950-2005*,
ZEF, Jakarta.
- M. Rendi Aridhayandi, 2016,
*Optimalisasi Peran Pemerintah
Daerah Dalam Perlindungan Anak
Korban Kekerasan Seksual (Kajian
Perpu RI No. 1 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas
UU No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak)*, Makalah
yang di presentasikan di Seminar
Nasional dan Call for Paper
Memperingati Hari Anak
Nasional, di Fakultas Hukum
Universitas Suryakencana,
Cianjur, 8 Desember 2016.
- Pantjar Simatupang, 2007, *Analisis
Kritis Terhadap Paradigma dan
Kerangka Dasar Kebijakan
Ketahanan Pangan Nasional*,
Forum Penelitian Agro Ekonomi,
Vol. 25, No. 1, Juli.
- Pantjar Simatupang, 1999, *Toward
Sustainable Food Security: The
Need for A New Paradigm*, *ACIAR
Indonesia Research Project*.
- Rahmadani Yusran & Asrinaldi A, 2005,
*Negara Kuat dalam Pelaksanaan
Demokrasi Lokal di Indonesia:
Tinjauan awal terhadap
Pemberlakuan Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004*, *Jurnal
Demokrasi*, Vol. IV, No. 2.
- Roosganda Elizabeth, 2008, *Peran
Ganda Wanita Tani dalam
Mencapai Ketahanan Pangan
Rumah tangga di Pedesaan*,
Puslitbang Tanaman Pangan,
Buletin Iptek Tanaman Pangan
Vol. 3, No. 1.
- Stevens, C., Greenhill, R., Kennan, J., &
Devereux S, 2000, *The WTO
Agreement on Agriculture and
Food Security*, *Commonwealth
Secretariat*.
- Syahyuti, Sunarsih, Sri Wahyuni,
Wahyuning K.S., dan Miftahul
Azis, 2015, *Kedaulatan Pangan
Sebagai Basis Untuk Mewujudkan
Ketahanan Pangan Nasional*,
Pusat Sosial Ekonomi dan
Kebijakan Pertanian, Forum
Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 33,
No. 2.
- Van der Eng, P, 2001. *Food for Growth:
Trends in Indonesia's Food Supply
1880-1995*, *Journal of
Interdisciplinary History*, XXX: 4.